

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Kajian Tentang Peran

a. Pengertian Peran

Peran atau yang dapat disebut dengan peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya (Soerjono Soekanto, 2005:243). Tak ada peranan tanpa kedudukan begitu juga kedudukan juga tidak akan berarti tanpa ada peranan. Peranan mempunyai arti, yaitu peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas- batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang- orang sekelompoknya. Hubungan- hubungan sosial yang ada di masyarakat merupakan hubungan antara peranan- peranan individu dalam masyarakat (2005:243).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, pada kamus sosiologi, peran (*role*) adalah (a) aspek dinamis dari kedudukan, (b) Bagian dari aktivitas

yang dimainkan oleh seseorang, (c) perangkat hak dan kewajiban, (d) perilaku aktual dari pemegang kedudukan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (2005:243).

Perlu disinggung perihal fasilitas- fasilitas bagi peranan individu (*role facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk menjalankan peran yang dimilikinya. Lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang- peluang untuk melaksanakan peranan. Perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan perbaikan fasilitas peranan (Soerjono Soekanto, 2005:244). Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Sejalan dengan adanya *status – conflict*, juga ada *conflict of roles*. Bahkan kadang- kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakan. Hal ini dinamakan

role distance yaitu suatu kesan yang ditonjolkan oleh individu bahwa ia tidak terlibat sepenuhnya atau tidak menerima definisi situasi yang tercermin dalam penampilan perannya. Ia melakukan komunikasi-komunikasi yang tidak sesuai dengan sifat dari peranannya untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar peran yang dimainkan. Gejala tadi timbul apabila individu merasakan dirinya tertekan. Karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan penjelasan tentang tinjauan peran diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Setiap orang memiliki peranan yang berbeda- beda tergantung dari kedudukannya dan peran juga dapat membimbing seseorang untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Robert K. Merton dalam Bernard Raho (2007), setiap individu dalam masyarakat memiliki bermacam- macam status, dan masing- masing status memiliki berbagai macam peran. Peran yang banyak itu dinamakan *role-set* atau perangkat peran. Status yang banyak tersebut dinamakan perangkat status atau *status-set*. Peranan yang melekat pada posisi seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu dalam organisasi kemasyarakatan. Peran yang diperoleh

individu jika lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peranan yang melekat pada posisi seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

2. Kajian Tentang Gender

a. Pengertian Gender

Gender berasal dari bahasa latin *genus* yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki- laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Dalam ilmu Sosiologi dan Antropologi, gender merupakan perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat tertentu dan pada masa tertentu pula (<http://id.wikipedia.org/wiki/Gender>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2012, pada pukul 09.10 WIB). Mansour Fakih (2010: 8) berpendapat bahwa konsep gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Gender merupakan istilah yang menjelaskan secara lebih mendalam, yakni sebagai maskulinitas dan feminitas, dan memanfaatkan sebagai alternatif (Kris Budiman: 1999: 104). Gender

tidak akan dapat dipahami secara sederhana hanya dengan membedakan kategori seks, yaitu laki-laki atau wanita. Julia Cleves Mosse (1996: 11) mengungkapkan bahwa dalam setiap masyarakat yang telah diteliti, kaum laki-laki dan wanita memiliki peran gender yang berbeda. Ada perbedaan yang mereka lakukan dalam komunitasnya sehingga status maupun kekuasaan mereka di dalam masyarakat boleh jadi berbeda pula.

Gender merupakan hasil dari suatu konstruksi, baik itu konstruksi sosial maupun konstruksi budaya. Konstruksi sosial dan budaya ini memegang peranan penting atas subordinasi perempuan sehingga memunculkan suatu realitas sosial dimana kaum laki-laki menguasai dan mendominasi kehidupan, dan perempuan menjadi subordinat dari laki-laki, dimana perempuan menjadi obyek untuk dimanipulasi untuk kepentingan laki-laki.

Gender sebagai istilah yang dianggap baru pada prinsipnya adalah proses membahaskan atau memberi simbol terhadap perilaku dan fenomena yang sesungguhnya telah lama ada dan berlaku dalam kehidupan manusia (Rasyidah, 2008: 9).

Terdapat beberapa Istilah gender yaitu sebagai berikut:

1). Gender sebagai Suatu Fenomena Sosial Budaya

Perbedaan jenis kelamin merupakan alami dan kodrat dengan ciri-ciri jelas dan tidak dapat dipertukarkan. Diskriminasi gender tidak melihat perbedaan jenis kelamin yang ada. Sebagai fenomena sosial, gender bersifat relatif dan konstektual. Gender diartikan sebagai suatu fenomena sosial budaya merupakan dampak sosial yang muncul dalam masyarakat karena adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin. Dalam realitas kehidupan, perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial.

Pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan, sifat kegiatan, dan jenis pekerjaan yang berbeda, seolah-olah laki-laki hanya bisa mengerjakan pekerjaan tertentu, sebaliknya perempuan juga hanya melakukan tertentu pula. Pada umumnya masyarakat tidak lazim jika peran tersebut dipertukarkan atau diubah. Peran gender kemudian diterima sebagai ketentuan sosial, bahkan diyakini oleh masyarakat sebagai kodrat (Mufidah, 2008:12).

Ideologi gender berpangkal pada larangan-larangan di sekitar menstruasi (*menstrual taboo*). Konsep tentang *menstrual taboo* juga membagi kehidupan manusia dalam dua sektor dengan sudut pandang dan moralitas yang berbeda. Di samping itu, konsep *menstrual-taboo*

juga merupakan masalah teologis yang penting (Irwan Abdullah, 2006: 61).

2). Gender sebagai Suatu Kesadaran Sosial

Konsep gender dalam wacana akademik dimaknai sebagai suatu kesadaran sosial. Pembedaan *sexual* dalam masyarakat merupakan suatu konstruksi sosial. Berangkat dari hal ini masyarakat mulai menyadari bahwa pembedaan tersebut merupakan hasil dari sejarah dan warga masyarakat dengan segala komunitasnya. Dengan adanya pembedaan tersebut maka terjadi adanya pemaknaan akan gender, karena konstruksi konsep gender tersebut. Manusia kemudian memahami ada banyak hal yang harus di ubah agar hidup menjadi lebih baik, harmonis dan bekeadilan (Mufidah, 2003:4). Kesadaran manusia akan kehidupan yang lebih baik, karena adanya pembagian peran gender yang tidak bersifat kodrati namun akibat adanya konstruksi sosial masyarakat (Mufidah, 2003:13).

3). Gender sebagai Suatu Persoalan Sosial Budaya

Pembedaan antara laki- laki dan perempuan sebenarnya dan seharusnya tidak dipermasalahkan bagi sebagian besar masyarakat. Pembedaan tersebut menjadi suatu masalah ketika pembedaan tersebut melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan, karena mayoritas masyarakat telah terpatri oleh budaya patriarkhi yang memandang bahwa jenis kelamin tertentu lebih tinggi kedudukannya. Untuk

menghapus ketidakadilan gender tersebut, tidak akan berarti tanpa membongkar permasalahan yang ada, yaitu pembedaan atas dasar seks. Dalam term ini, perjuangan ketidakadilan gender tidak hanya menyentuh persoalan praktis. Namun telah memasuki wilayah filosofis dan agama. Jika sudah mengarah kepada hal filosofis dan agama, maka yang berbicara disini adalah ideologi. Ideologi yang lazimnya berkembang adalah ideologi familialisme dimana peran perempuan dan laki- laki dalam masyarakat dari peran- peran mereka dalam keluarga. Berdasarkan ideologi familialisme, peran utama laki- laki adalah sebagai penguasa utama rumah tangga yang memiliki hak- hak istimewa dan otoritas terbesar dalam keluarga (Irwan Abdullah, 2006:92).

4). Gender sebagai Sebuah Konsep untuk Analisis

Konsep serta definisi gender tidak dapat dilepaskan dari suatu asumsi dasar dan paradigma. Asumsi dasar tersebut, merupakan pandangan filosofis dan ideologis. Guna kepentingan analisis, gender dipahami sebagai akibat dari pembedaan atas jenis kelamin baik laki- laki maupun perempuan. Pemahaman dan pembedaan antara konsep jenis kelamin dan gender sangatlah diperlukan guna menganalisis serta memahami ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari pembedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lainnya sesuai dengan paradigma yang dipergunakan dalam penelitian. Gender sebagai alat analisis

bermanfaat untuk melengkapi alat analisis sosial dan bukan untuk menggantikannya.

b. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender sudah terjadi dari generasi ke generasi di semua etnis bangsa- bangsa, maka keadilan gender menjadi sulit diidentifikasi ketidakadilannya. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki- laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender yang sudah membudaya mengakibatkan perempuan mengalami marginalisasi, subordinasi, *stereotipe*, keperempuanan yang cenderung negatif, tindak kekerasan, dan pelecehan serta beban kerja domestik terlalu banyak (Tharir, 1996:94-96).

Menurut Mansour Fakih dalam Farida Hanum (2007) Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk antara lain:

1). Gender dan Marginalisasi Perempuan

Merupakan rendahnya status dan akses serta penguasaan seorang perempuan terhadap sumber daya ekonomi, politik dalam pengertian kemiskinan yang menyebabkan kemiskinan. Anggapan bahwa perempuan hanya diberi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, akan menyebabkan kondisi perempuan terbelakang dan

miskin. Marginalisasi perempuan muncul dan menunjukan bahwa perempuan kurang begitu diperhitungkan sehingga perempuan menjadi *the second sex* atau sering disebut ‘warga kelas dua’ yang kurang diperhitungkan. Usaha ini telah menyebabkan terjadinya proses produksi pertimbangan hubungan antara laki- laki dengan perempuan (Irwan Abdullah, 2006:3).

Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, namun juga dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi kaum perempuan dalam organisasi menyangkut banyak hal, dalam aktivitas sehari- hari seringkali kaum laki- laki memegang peranan dalam pelbagai kegiatan baik itu yang bersifat praktis maupun dalam pengambilan keputusan. Marginalisasi perempuan diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir agama yang terkadang diartikan secara mentah, sehingga sulit sekali bagi organisasi maupun dalam kegiatan sehari- hari untuk menerapkan prinsip- prinsip kesetaraan gender.

2). Gender dan Subordinasi

Merupakan keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin lebih utama dibandingkan jenis kelamin yang lain. Misalnya dalam organisasi perempuan menjadi manusia kedua setelah laki- laki yang dianggap sebagai makhluk lemah dan tidak dapat mengambil

keputusan sendiri, sehingga perempuan kurang mendapatkan kesempatan untuk memimpin.

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi- tinggi, toh nantinya akan ke dapur juga. Bahkan pemerintah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan istri yang hendak belajar ke luar negeri harus seizing suami. Praktik tersebut berangkat dari kesetaraan gender.

3). Gender dan Stereotipe

Stereotipe merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok yang seringkali bersifat negatif yang secara umum melahirkan ketidakadilan pada satu jenis kelamin tertentu (Trisakti Handayani dan Sugiarti, 2008:5). Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya.

Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negatif

ditimpakan kepada perempuan. Contohnya: perempuan yang diidentikkan lembut, lemah emosional dan identik dengan pekerjaan rumah, maka peluang untuk bekerja di luar rumah sangat terbatas bahkan ada perempuan yang memiliki pendidikan tinggi namun tidak pernah menggunakan atau menerapkan pendidikannya untuk mengaktualisasikan diri

4). Gender dan Kepemimpinan

Terdapat stereotipe gender yang dikaitkan dengan kepemimpinan. Sejumlah laki- laki dalam manajemen senior menciptakan sebuah *image* yang menjurus pada pengabdianya sendiri (*Self pertuating*). Stereotipe tersebut dipertegas oleh adanya asumsi bahwa “asumsi yang tidak benar kepemimpinan adalah sebuah karakteristik laki- laki yang memerlukan kekerasan fisik dan mental serta kemampuan untuk mendekati kesulitan- kesulitan tanpa menggunakan emosional”(Tony Bush dan Marianne Coleman, 2006:96). Dalam sebuah studi yang dilakukan untuk mengetahui perbedan antara laki- laki dan perempuan dapat disimpulkan bahwa: a) laki- laki lebih memperhatikan hal- hal yang terkait dengan finansial seperti gaji mereka dari pada wanita lebih memperhatikan beban kerja mereka. b) perempuan lebih memiliki kerjasam dan *team work* yang lebih kompetitif. c) laki- laki sudah merasa cukup puas dengan apa yang telah dihasilkannya atau pekerjaannya, sedangkan wanita masih merasa ragu. d) laki- laki

lebih menginginkan status dan penghargaan sedangkan perempuan tidak menginginkan penghargaan.

Dari sinilah Nampak bahwa sebagian laki- laki mendominasi kultur kekuasaan. Stereotipe- stereotipe dan teori- teori tentang kepemimpinan sebagian besar menonjolkan laki- laki sehingga perempuan menjadi tersisihkan dan tidak mampu untuk memimpin.

Ketidaksetaraan gender tertanam dalam struktur dan budaya masyarakat, keduanya terus mengalir dalam tubuh dan jiwa organisasi sehingga melembaga ke dalam kepimpinan. Disengaja atau tidak, budaya dalam organisasi campuran yang paling progresif sangat memungkinkan bersifat maskulin dan mendiskriminasikan perempuan (Bush, 2006:181).

5). Gender dan Pengambilan Keputusan

Masyarakat sering kali menempatkan konsep gender dan seks sebagai konsep yang mempunyai implikasi sama. Pandangan yang kurang tepat terhadap konsep seks dan gender juga berimplikasi pada ketidakdilan gender. Perbedaan peran yang cenderung menomorduakan perempuan dianggap sebagai hal yang wajar sebagai akibat adanya perbedaan laki- laki secara *natural*. Dengan adanya hal semacam itu, maka berimbang pada peranan gender dalam organisasi terutama saat pengambilan keputusan. Dengan mayoritas organisasi di hadapkan pada maskulinitas maka secara langsung

peran perempuan menjadi sedikit. Intervensi laki- laki yang begitu besar menyebabkan peran perempuan kurang begitu di perhatikan.

Pergeseran paradigma menegaskan bahwa untuk memajukan perempuan diperlukan lebih dari sekedar mengintegrasikan mereka dalam pembangunan, tetapi yang utama adalah mengubah pola relasi gender yang merugikan perempuan. Target terpentingnya adalah adalah diberikan dan diakuinya keterlibatan perempuan dalam jantung kendali masyarakat, yaitu posisi penentu dalam pengambilan keputusan dari setiap kebijakan baik di legislatif atau eksekutif (Budi Asyari dan Subkhi Ridho, 2008:103).

Dalam konteks proses penetapan kebijakan oleh Negara, keterlibatan perempuan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih kecilnya angka prosentase perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan- kebijakan umum. Permasalahan representasi perempuan di lembaga pemerintahan atau pun yang lain menjadi satu isu politik yang mendapat sorotan tajam, karena perempuan masih termarjinalkan dalam pengambilan keputusan (Asyari, 2008:104). Menurut Mansour Fakih dalam Budi Asyari dan Subkhi Ridho (2008) manifestasi ketidakadilan gender terhadap perempuan terjadi salah satunya adalah terjadinya subordinasi terhadap perempuan yang berkaitan dengan politik, terutama menyangkut proses pengambilan

keputusan dan pengendalian kekuasaan. Dari sudut pandang analisis gender hal tersebut tidak lepas dari *stereotipe* perempuan dan politik. Stigma bahwa perempuan identik dengan sektor domestik sering dianggap sebagai salah satu penyebab terlambatnya dan sedikitnya perempuan yang terlibat dalam dunia politik.

c. Gerakan Kesetaraan Gender

Gender merupakan konsep yang mengacu pada peran- peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan yang terjadi dari keadaan sosial dan budaya masyarakat. Menurut Fakih, memaknai gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki- laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Bush, 2006:10). Dengan konstruksi gender yang telah dibangun oleh masyarakat, maka timbul ketidakadilan dan diskriminasi gender. Berangkat dari hal tersebut maka perlu adanya gerakan kesetaraan gender agar proporsi gender bisa berjalan seimbang dalam masyarakat.

Kesetaraan gender merupakan posisi yang sama antara laki- laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik keluarga, masyarakat dan bernegara. Keadilan gender merupakan proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, dan tanpa diskriminasi (Mufidah Ch, 2003:4-6). Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kondisi

dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki- laki setara, seimbang, dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud jika terdapat perlakuan adil antara laki- laki dan perempuan.

Masyarakat sering kali menempatkan konsep gender dan seks sebagai konsep yang memiliki implikasi yang sama, padahal keduanya memiliki implikasi yang berbeda. Seks atau jenis kelamin ditentukan oleh atribut biologis yang melekat secara kodrat. Sedangkan gender diartikan sebagai atribut yang melekat pada laki- laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.

Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat/komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah, dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi dan kemasyarakatan. Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Peran dan konsep gender ini mempunyai kedudukan penting dalam menjalankan kehidupan dalam masyarakat. Peran dan konsep gender terkadang menimbulkan ketidakadilan dan penindasan

terhadap kaum perempuan, serta dapat mem marginalkan kaum perempuan.

Konsep kesetaraan gender ini memang merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan mengundang kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban, yang tentunya masih belum jelas. Dengan adanya ketidakjelasan tersebut maka timbul ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam beberapa hal.

Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe, dan beban kerja tersebut terjadi di pelbagai tingkatan (Fakih, 2010:12). Pertama, manifestasi ketidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat Negara, yang dimaksud di sini baik pada satu Negara maupun organisasi antar Negara seperti PBB. Banyak kebijakan tentang hukum Negara, perundang- undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari manifestasi ketidakadilan gender. Kedua, manifestasi ketidakadilan gender juga terjadi pada tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan kerja yang masih melanggengkan ketidakadilan gender. Ketiga, bentuk ketidakadilan gender juga terjadi dalam adat istiadat masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku- suku atau dalam tafsiran keagamaan. Keempat, manifestasi ketidakadilan gender juga terjadi di

lingkungan rumah tangga, hal ini biasanya terjadi pada proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keluarga dilaksanakan dengan menggunakan asumsi bias gender. Oleh karena itu keluarga juga menjadi tempat kritis dalam mensosialisasikan ketidakadilan gender. Kelima, bentuk ketidakadilan gender tersebut telah mengakar di dalam keyakinan dan menjadi ideologi kaum perempuan maupun laki- laki.

Persoalan kesetaraan gender yang paling mendasar adalah bahwa belum semua perempuan memiliki atribut- atribut sosial yang mendukung pemberdayaan dalam meraih kesetaraan berperan. Upaya yang paling tepat dilakukan untuk mesosialisasikan kesetaraan gender salah satunya adalah perencanaan pembangunan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan peran gender dan ketergantungan antara laki- laki dan perempuan sebagai suatu hal yang dapat diubah dan akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial- budaya masyarakat yang bersangkutan (Anshori, 1997:64).

Saat ini wacana publik mengenai kesetaraan gender sudah meluas diberbagai sudut kehidupan. Kesadaran akan kesetaraan gender sedang diperjuangkan oleh kaum feminis untuk menjadi kontrol bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan manusia, dan perlakuan sama antara laki- laki dan

perempuan baik di lingkup keluarga, masyarakat, organisasi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya.

Keadilan gender juga dapat diperjuangkan melalui transformasi sosial. Transformasi sosial merupakan proses penciptaan hubungan fundamental baru dan lebih baik. Hubungan fundamental yang lebih baik di sini adalah struktur ekonomi, hubungan budaya, struktur politik dimana saling mendominasi perempuan menuju struktur yang membebaskan (Fakih, 1996:73). Dalam konsep kesetaraan gender di sini, perempuan diberikan hak dan kewajiban yang sama guna mengembangkan kualitas diri.

d. Kajian Tentang Feminisme

Feminisme merupakan kumpulan pemikiran, pendirian, dan aksi berangkat dari kesadaran, asumsi serta kepedulian terhadap ketidakadilan, ketidaksetaraan, penindasan atau diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dalam perkembangan selanjutnya gerakan feminism memproyeksikan suatu visi masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera menurut perspektif feminism (Fakih, 1996:145). Feminisme pada dasarnya bukan hanya sebatas pada persoalan gender yang sempit, karena ia tidak lain merupakan gerakan kemanusiaan, yang tidak harus dihubungkan dengan gerakan humanisme. Dengan kata lain, feminism hanya ingin mendekatkan persoalan dasar tentang kehidupan bahwa terdapat hak-hak kemanusiaan yang perlu diperjuangkan. Oleh karena itu, bukan

saja perempuan yang memiliki kesadaran atas realita ini, namun laki-laki pun dapat memiliki kesadaran yang sama dan memiliki hak yang sama pula untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan (Awwuy, 1995:88).

Terdapat beberapa aliran gerakan feminism, antara lain:

1). Feminisme Liberal

Feminisme Liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Feminis liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terlepas dari menjadikannya kepentingan yang bersifat maskulin, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki

(<http://id.wikipedia.org/wiki/feminisme>, diunduh tanggal 8 Oktober 2012, Pukul 19.35 WIB).

2). Feminisme Radikal

Asumsi dari aliran ini adalah bahwa penindasan yang dialami perempuan berakar dari masalah budaya patriarkhi dimana laki- laki mempunyai privelense ekonomi dan kekuasaan yang besar dibanding perempuan, hal ini membuat perempuan menjadi terhegemoni dan termarginalkan. Ketidakadilan tersebut dapat dihilangkan jika budaya patriarkhi yang telah lama berada dalam padangan kehidupan masyarakat dihilangkan. Untuk menghilangkannya adalah dengan menggiatkan kaum perempuan untuk ikut serta pada bidang sosial, politik, pendidikan terutama dalam membuat keputusan terkait dengan kebijakan- kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Feminis radikal memilki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasl dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum Pria, yang terleflexikan menjadi kepentingan yang bersifat maskulin (<http://id.wikipedia.org/wiki/feminisme>, diunduh pada tanggal 8 Oktober 2012, Pukul 20.00 WIB). Oleh karena itu, kaum femisme radikal berusaha membongkar struktur sistem budaya patriarkhi. Dengan cara melibatkan langsung peran perempuan dalam kehidupan politik dan sosial. Tujuan dari program ini agar

perempuan ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

3). Feminisme Marxis

Asumsi dari aliran ini bahwa penindasan yang dialami kaum perempuan bersumber dari eksplorasi kelas dalam cara produksi. Aliran ini berpendapat jatuhnya status perempuan bermula dari perubahan teknologi produksi yang pada akhirnya melahirkan perubahan organisasi kekayaan atau organisasi kepemilikan. Dalam aliran ini kaum perempuan yang dianalogikan sebagai kaum buruh harus melakukan tindakan perlawanan terhadap kaum laki-laki sebagai pemilik modal untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Kaum Feminis Marxis, menganggap bahwa negara bersifat kapitalis yakni menganggap bahwa negara bukan hanya sekadar institusi tetapi juga perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara memiliki kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, namun disisi lain, negara bersifat kapitalisme yang menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja.

Agenda utama dari feminism Marxis adalah sosialisasi pekerjaan perempuan. Pentingnya sosialisasi pekerjaan perempuan bukan berarti membebaskan perempuan dari pekerjaan rumah tangga,

akan tetapi guna menyadarkan setiap orang mengenai betapa pentingnya pekerjaan tersebut secara sosial.

4). Feminisme Sosialis

Aliran ini hendak mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsi aliran ini adalah penindasan perempuan tidak hanya terjadi pada tatanan pertentangan kelas, melainkan juga adanya sistem patriarkhi. Masyarakat telah lama tersosialisasi oleh budaya patriarkhi yang mengutamakan laki- laki, serta masyarakat juga telah cukup lama terhegemoni oleh nilai- nilai yang bias gender. Pada aliran ini aktivitas perempuan terhegemoni oleh kodratnya yang ada sehingga sulit untuk berkembang untuk melakukan suatu kegiatan.

3. Kajian Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural merupakan perspektif dalam sosologi yang memandang bahwa masyarakat sebagai sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Tokoh yang mencetuskan teori ini adalah Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim. Teori berpendapat bahwa masyarakat sebagai suatu unsur organisme yang hidup, artinya mengalami pertumbuhan sehingga akan menjadi lebih kompleks yang membentuk fungsi serta tujuan tertentu (Poloma, 2007:24). Setelah Perang Dunia II, teori fungsionalisme struktural mengalami kemerosotan dalam dua dekade dalam arti

pentingnya. Moore menyatakan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang memalukan dalam perkembangan teori sosiologi pada masa kini, Demerath dan Peterson dalam Ritzer (2007) berpandangan bahwa fungsionalisme struktural belum mati, namun menambahkan teori yang mungkin dapat dikembangkan menjadi teori lain sebagaimana teori ini dikembangkan dari pemikiran organisme. Dibawah ini merupakan beberapa padangan struktural fungsional, antara lain:

a. Fungsionalisme Struktural Talcott Parson

Fungsionalisme struktural Parson akan dimulai dengan empat fungsi penting dalam sistem “tindakan”, terkenal dengan sistem AGIL. AGIL merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Parson mengemukakan ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem, yaitu *Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency*. Agar dapat tetap bertahan maka harus ada empat sistem tersebut yaitu:

- 1). Adaptasi (*Adaptation*), sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- 2). Pencapaian Tujuan (*Goal attainment*), sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- 3). Integrasi (*Integration*), sistem harus mengatur antar hubungan bagian- bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting (A,G,L).

4). Latensi atau Pemeliharaan Pola (*Latency*), sistem harus memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola- pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer, 2007:121).

Desain skema AGIL Parson digunakan pada empat sistem tindakan dalam kerangka teorinya, yaitu:

1). Organisme perilaku, merupakan tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan mobilisasi sumber daya yang ada guna mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Serta sistem kultural sebagai pemeliharaan pola.

Parson mempunyai gagasan mengenai tingkatan analisis sosial maupun mengenai hubungan antara berbagai tingkatan itu. Pertama, masing- masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi. Kedua, tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya.

2). Sistem Sosial, berawal pada interaksi tingkat mikro antara ego-alter ego yang didefinisikan sebagai bentuk sistem sosial yang mendasar. Pada konsep- konsep kunci Parson terdapat aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan kultur. Parson

berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai sebuah interaksi, namun ia tak menggunakan pendekatan aktor tetapi lebih menggunakan pendekatan struktural dalam sistem sosial. Menurutnya status mengacu pada struktural dalam sistem sosial. Sedangkan peran merupakan apa yang dilakukan aktor dalam posisi tersebut. Dalam analisisnya tentang sistem sosial, Parson tertarik pada komponen strukturalnya, ia menjelaskan persyaratan fungsional dari sistem sosial, antara lain:

- a). Sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga bias beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya.
- b). Sistem sosial harus mendapatkan dukungan dari sistem yang lain.
- c). Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya.
- d). Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.
- e). Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
- f). Bila terjadi konflik akan menimbulkan kekacauan, maka harus dikendalikan.
- g). Sistem sosial memerlukan bahasa guna menjaga kelangsungan hidupnya.

Jelas bahwa Parson menjelaskan tentang persyaratan fungsional sistem sosial harus pada skala luas dan pada hubungan antara berbagai sistem luas itu.

3). Aktor dan Sistem Sosial

Parson tidak mengabaikan masalah hubungan antara aktor dan struktur sosial. Menurutnya, persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Ia tertarik pada cara mengalihkan norma dan nilai sistem sosial kepada aktor di dalam sistem sosial itu. Proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai diinternalisasikan, artinya norma dan nilai itu menjadi bagian dari kesadaran aktor. Akibatnya dalam mengajar kepentingan mereka sendiri itu, aktor sebenarnya mengabdi kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan

4). Masyarakat

Meskipun pemikiran tentang sistem sosial meliputi semua jenis kehidupan kolektif, satu sistem sosial khusus dan yang sangat penting adalah masyarakat yaitu kolektivitas yang relatif mencukupi kebutuhannya sendiri, anggotanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan kolektif dan individualnya dan hidup sepenuhnya di dalam kerangkaya sendiri.

5) Sistem Kultural

Merupakan kekuatan utam dalam mengikat sistem tindakan. Kultur menengahi interaksi antar aktor, menginterpretasikan

kepribadian, dan menyatukan sistem sosial. Didalam sistem sosial, sistem di wujudkan dalam norma dan nilai serta dalam sistem kepribadian ia diinternalisasikan oleh aktor. Namun dalam sistem kultural tidak semata- mata menjdi bagian sistem yang lain, tapi juga mempunyai eksistensi yang terpisah dalam bentuk pengetahuan, simbol- simbol dan gagasan- gagasan.

b. Fungsional Struktural Robert K. Merton

Merton mengkritik tiga postulat dasar analisis struktural, yaitu postulat tentang fungsional masyarakat, fungsionalisme universal, dan *indispensability*. Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Ia menyatakan setiap objek dapat dijadikan sasaran analisis struktural fungsional tentu mencerminkan hal standar. Menurut pemikiran Merton, sasaran studi struktural fungsional antara lain: peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, norma sosial, struktur sosial. Menurut Merton, fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu.

4. Kajian Tentang Muhammadiyah

Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan menifestasi dari gagasan

pemikiran dan amal perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) yang menjadi pendirinya. Didirikan pada bulan Dzulhijah tepatnya tanggal 8 Dzulhijah 1330 H atau tanggal 18 November 1912. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di Tanah Air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kyai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Syeikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang; juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.

Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kyai Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kyai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad.

Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kyai Dahlan sebagai pendirinya, yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Kyai Dahlan, sebagaimana para pembaru Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid (pembaruan) yang meliputi aspek-aspek tauhid ('aqidah), ibadah, mu'amalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam, dengan mengembalikan kepada sumbernya yang aseli yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang Shakhih, dengan membuka ijtihad.

Secara internal ada dua hal yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan dalam Amien Rais (1997) dengan mendirikan Muhammadiyah, yaitu:

“pertama, melepaskan umat islam dari kungkungan takhayul, bid'ah, dan khurafat yang membelenggu umat dari penuhanan tauhid yang benar, kedua, memajukan pendidikan umat Islam dengan memberikan angkatan mudanya ilmu- ilmu Barat dalam rangka merebut kebahagiaan keduniaan yang juga harus dikejar oleh umat Islam.”

Secara eksternal, KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai reaksi atas aktivitas missionaris (Misi Katholik dan Zending Protestan), terutama di Jawa Tengah dan

Yogyakarta. Sejak awal didirikan, Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi dakwah dan pendidikan (organisasi sosial-keagamaan), bukan sebagai organisasi politik. Oleh karena itu, sikap politik Muhammadiyah lebih moderat, kooperatif, dan tidak pernah menjadi oposan. Komitmen Muhammadiyah untuk lebih mengutamakan bidang dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dengan secara tegas Muhammadiyah terlepas dari bidang politik. Menurut pandangan Deliar Noer Hal ini tidak berarti bahwa Muhammadiyah anti politik, karena bagaimanapun juga Muhammadiyah pasti ikut terlibat dalam percaturan politik (dalam Nurhadi M. Musawir, *ed*, 1996:13).

Wujud sikap netral Muhammadiyah terhadap kegiatan politik praktis selama masa orde baru, menurut Din Syamsudin, disebutkan dengan istilah “politik Alokatif” (*Allocative Politics*). Istilah ini mengandung arti bahwa aktivitas politik Muhammadiyah diupayakan untuk menanamkan nilai- nilai tertentu ialah prinsip Islam yang ditanamkan ke dalam proses pembangunan berdasarkan Pancasila.

5. Kajian tentang Aisyiyah

Akar berdirinya Aisyiyah tidak bisa dilepaskan kaitannya dari akar sejarah Muhammadiyah. Spirit berdirinya Muhammadiyah telah mengilhami berdirinya hampir seluruh organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah, termasuk Aisyiyah. KHA. Dahlan mendirikan kelompok pengajian wanita yang anggotanya terdiri para gadis-gadis

dan orang-orang wanita yang sudah tua. Dalam perkembangannya, kelompok pengajian wanita itu diberi nama *Sapa Tresna*. *Sapa Tresna* belum merupakan organisasi, hanya suatu gerakan pengajian saja. Oleh karena itu, untuk memberikan suatu nama yang kongkrit menjadi suatu perkumpulan, K.H. Mokhtar mengadakan pertemuan dengan KHA. Dahlan yang juga dihadiri oleh H. Fakhrudin dan Ki Bagus Hadikusumo serta pengurus Muhammadiyah lainnya di rumah Nyai Ahmad Dahlan. Awalnya diusulkan nama Fatimah, untuk organisasi perkumpulan kaum wanita.

Nama Aisyiyah dipandang lebih tepat bagi gerakan wanita ini karena didasari pertimbangan bahwa perjuangan wanita yang akan digulirkan ini diharapkan dapat meniru perjuangan Aisyah, isteri Nabi Muhammad, yang selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah. Peresmian Aisyiyah dilaksanakan bersamaan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad pada tanggal 27 rajab 1335 H, bertepatan 19 Mei 1917 M. Peringatan Isra' Mi'raj tersebut merupakan peringatan yang diadakan Muhammadiyah untuk pertama kalinya (PP Aisyiyah, 2007:17).

Gerakan pemberantasan kebodohan yang menjadi salah satu pilar perjuangan Aisyiyah dicanangkan dengan mengadakan pemberantasan buta huruf pertama kali, baik buta huruf arab maupun latin pada tahun 1923. Dalam kegiatan ini para peserta yang terdiri dari para gadis dan ibu-ibu rumah tangga belajar bersama dengan

tujuan meningkatkan pengetahuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia publik. Selain itu, pada tahun 1926, Aisyiyah mulai menerbitkan majalah organisasi yang diberi nama Suara Aisyiyah, yang awal berdirinya menggunakan Bahasa Jawa. Melalui majalah bulanan inilah Aisyiyah antara lain mengkomunikasikan semua program dan kegiatannya termasuk konsolidasi internal organisasi.

Dalam hal pergerakan kebangsaan, Aisyiyah juga termasuk organisasi yang turut memprakarsai dan membidangi terbentuknya organisasi wanita pada tahun 1928. Dalam hal ini, Aisyiyah bersama dengan organisasi wanita lain bangkit berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Lewat federasi ini berbagai usaha dan bentuk perjuangan bangsa dapat dilakukan secara terpadu.

Aisyiyah berkembang semakin pesat dan menemukan bentuknya sebagai organisasi wanita modern. Aisyiyah mengembangkan berbagai program untuk pembinaan dan pendidikan wanita. Diantara aktivitas Aisyiyah ialah Siswa Praja Wanita bertugas membina dan mengembangkan puteri- puteri di luar sekolah sebagai kader Aisyiyah.

Setelah terbentuknya perkumpulan dan pergerakan Aisyiyah mulai melaksanakan kerja-kerja sosial untuk kemajuan dan peningkatan kualitas wanita Indonesia.

Pada tahun 1919, Aisyiyah mendirikan Taman Kanak-kanak dengan nama FROBEL. Taman Kanak-kanak ini merupakan Taman Kanak-Kanak yang pertama kali didirikan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, Taman Kanak-Kanak ini diberi nama TK Aisyiyah Bustanul Athfal. Dalam TK Aisyiyah Bustanul Athfal ini, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa diperkenalkan dengan agama sedini mungkin untuk membekali mereka di kemudian hari. Pada tahun 1923, Aisyiyah mengadakan pemberantasan buta huruf, baik huruf Arab maupun huruf Latin, peserta yang ikut dari para gadis sampai dengan orang tua. Mereka belajar bersama dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemajuan partisipasi perempuan dalam dunia publik. Tahun 1925, untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi, Aisyiyah menerbitkan majalah wanita yang bernama Suara Aisyiyah.

Aisyiyah berpendirian bahwa harkat martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa peningkatan kemampuan ekonominya. Oleh karena itu, Aisyiyah mengembangkan berbagai amal usaha pemberdayaan ekonomi ini datam bentuk koperasi (termasuk koperasi simpan pinjam), *Baitul Mal wa Tamwil*, toko/kios, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA), home industri, kursus ketrampilan dan arisan.

Dengan visinya Pengembangan Tercapainya usaha-usaha Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka hingga sekarang Aisyiyah terus gencar melakukan dakwah dan sosialisasi kesetaraan gender agar menuju pada masyarakat yang madani. Ada beberapa lembaga dan majelis pada Aisyiyah diantaranya majelis Kesejahteraan Sosial untuk membantu anak yatim dan kaum miskin. Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup untuk membantu pelayanan serta meningkatkan mutu kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengembangkan visi pendidikan Aisyiyah yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa. Dengan tujuan memajukan pendidikan (formal, non formal dan informal) serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air dan berguna bagi masyarakat serta diridhai Allah SWT. Majelis Pendidikan Kader bertujuan untuk menangani masalah kaderisasi dan pengembangan sumber daya kader di lingkungan Angkatan Muda Muhammadiyah Putri secara integratif dan professional yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar makruf nahi mungkar menuju masyarakat madani. Majelis Pendidikan Tinggi bertujuan untuk membina, mengkoordinasikan Perguruan Tinggi

Aisyiyah di seluruh Indonesia, serta memberikan bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan tinggi Aisyiyah.

Sementara itu, selain majelis juga terdapat lembaga, antara lain: Lembaga Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kajian tentang masalah atau isu-isu yang berkembang, baik mengenai organisasi maupun masalah sosial yang terkait dengan sikap perempuan dan organisasi, seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak, peran politik perempuan, diskriminasi gender. Lembaga Kebudayaan bertujuan untuk merespon perubahan budaya yang berkembang dengan cepat akibat adanya perkembangan teknologi dan informasi yang demikian pesat. Selain untuk menjaga agar transformasi kebudayaan tersebut tetap berada datam garis ajaran Islam. Lembaga Hubungan Organisasi, Hukum, dan Advokasi (LHOHA) bertujuan untuk membangun dan menjalin hubungan kerjasama dalam rangka memperluas sayap gerakan untuk mencapai tujuan organisasi. Lembaga Humas dan Penerbitan bertujuan untuk mengkomunikasikan segala kegiatan, program serta kebijakan organisasi kepada pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal serta membentuk citra positif Aisyiyah di masyarakat luas (<http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-det-aisiyah.html>, diunduh tanggal 9 Oktober 2012, Pukul 22.11 WIB). Berkaitan dengan gender, Aisyiyah merupakan mitra bagi

Muhammadiyah untuk melakukan dakwah di masyarakat. Mitra ini terus dibangun untuk peningkatan dakwah serta pengabdian pada masyarakat.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin, Nur Hidayah, dan Supardi tahun 2008. Dengan judul “Sensitivitas dan Aplikasi Kesetaraan Gender di Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kesetaraan gender dalam organisasi kemahasiswaan yang tertuju pada akses mahasiswa terhadap wacana kesetaraan gender serta aplikasi kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditujukan untuk mengetahui lingkup dari subyek penelitian sebagai sumber, tempat penentuan suatu kajian.

Penelitian relevan di atas memiliki persamaan dalam beberapa hal dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Kesamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang perempuan terkait dengan kesetaraan gender dimana perempuan mempunyai akses serta kontrol dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, dan kesempatan antara laki- laki dan perempuan dalam memperoleh kedudukan pada struktur organisasi.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin dan kawan- kawan terdiri

dari beberapa organisasi kemahasiswaan yang terdapat di Universitas Negeri Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat spesifik dalam organisasi otonom Muhammadiyah yaitu Aisyiyah kaitannya dengan peran yang dilakukan dalam kesetaraan gender.

2. Penelitian relevan selanjutnya adalah Arief Budiawan, mahasiswa Pendidikan Sosiologi FISE UNY tahun 2010, yang berjudul “Sensitivitas Gender pada Aktifitas Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi (HIMA DILOGI) Universitas Negeri Yogyakarta periode 2010”. Penelitian ini bertujuan guna melihat peluang jabatan, kegiatan praktis, dan keputusan politik yang terjadi di HIMA DILOGI tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan gender antara laki- laki dan perempuan . Kegiatan- kegiatan HIMA DILOGI menunjukkan kedudukan perempuan dalam pembagian kerja selalu ditempatkan dalam pekerjaan- pekerjaan domestic seperti seksi konsumsi dan bendahara. Sedangkan untuk kepemimpinan selalu dijabat oleh laki- laki. Dapat diartikan, bahwa dalam pembagian kerja pada setiap kegiatan- kegiatan praktis HIMA DILOGI tidak memperhatikan kesetaraan gender.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama- sama bertujuan guna melihat peluang perempuan

dalam pengambilan keputusan dan menduduki jabatan di organisasi. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada sensitivitas gender pada Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melihat bagaimana implikasi kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam organisasi Muhammadiyah.

3. Penelitian relevan selanjutnya adalah dari Anggun Kusuma Wardani, mahasiswa Pendidikan Sosiologi FISE UNY tahun 2010, yang berjudul “ Peran Aktivis Mahasiswa Perempuan dalam Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa FISE UNY 2009”. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana peran aktivis mahasiswa perempuan dan peran perempuan dalam organisasi. Pendekatan metode dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik *purposive sampling*, untuk pengumpulan data, menggunakan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data guna menguji keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data dengan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan keterlibatan penelitian ini menunjukkan keterlibatan perempuan dalam BEM FISE cukup optimal yang terbukti pada program kerja, struktur organisasi BEM. Adanya bias gender sehingga menempatkan perempuan pada jabatan tertentu, yaitu sekretaris, bendahara, dan seksi konsumsi.

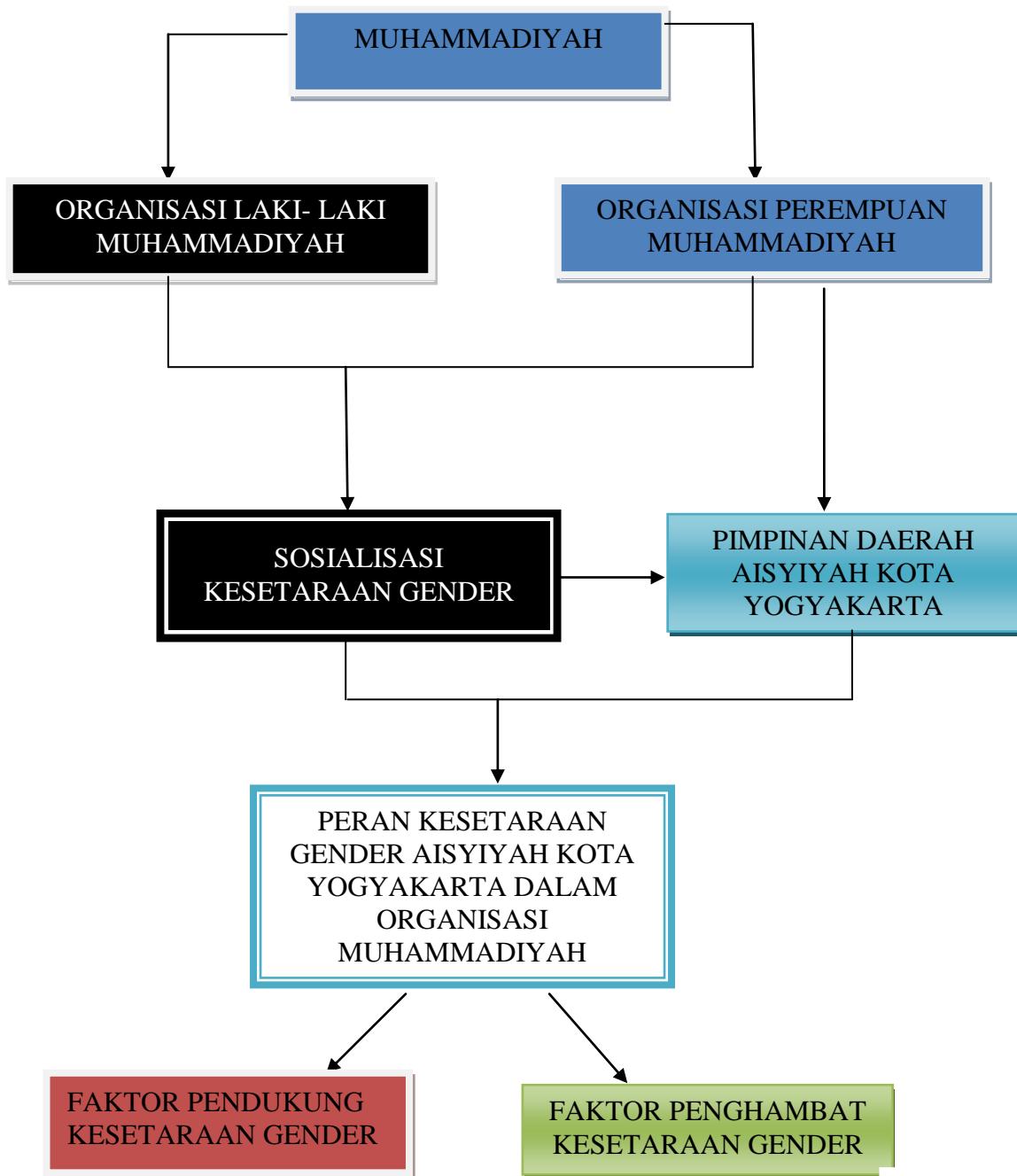
Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama melihat sejauh mana peran perempuan dalam aktifitas organisasi. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kusuma Wardani melihat bagaimana peran perempuan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih melihat bagaimana akses yang didapatkan perempuan dalam Aisyiyah untuk memperoleh jabatan dalam Muhammadiyah.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah pijakan dalam menentukan arah penelitian, hal ini digunakan untuk menghindari terjadinya perluasan bidang garapan yang mengakibatkan penelitian semakin tidak terfokus. Kerangka berpikir ini menjadikan tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menjadi semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi sosial-keagamaan yang terbesar di Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi ini didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 Nopember 1912 M di Yogyakarta oleh K.H.Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah sendiri dibagi menjadi beberapa organisasi otonom khusus yang didalamnya terdapat organisasi otonom khusus laki-laki dan organisasi perempuan Muhammadiyah khususnya Aisyiyah. Diantara

kedua persyarikatan bersama-sama mensosialisasikan kesetaraan gender terutama dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah. Keterwakilan dalam sosialisasi kesetaraan gender ini dilakukan oleh Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam organisasi Muhammadiyah terutama di Kota Yogyakarta. Dengan adanya sosialisasi kesetaraan gender ini maka akan timbul peran kesetaraan gender dari Aisyiyah itu sendiri dalam hal ini Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta. Berbagai faktor penghambat dan pendukung akan muncul ketika sejalan dengan peran kesetaraan gender mengingat persyarikatan Muhammadiyah masih begitu kuat kultur patriarkhi yang memang ditanamkan sejak pertama kali berdiri.



Bagan 1. Kerangka Berpikir